

DAMPAK KERJASAMA *INDONESIA-JAPAN MARITIME* FORUM (IJMF) TERHADAP KEAMANAN MARITIM KEPULAUAN NATUNA

Oleh : Elga Oktavianda

Pembimbing: Dr. Saiman, S. IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kerjasama *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF) terhadap peningkatan keamanan maritim di wilayah Kepulauan Natuna. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya dinamika keamanan di Laut Natuna Utara akibat aktivitas penangkapan ikan ilegal, pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing, serta ketegangan di kawasan Laut Natuna Utara. Fokus kajian penelitian ini pada periode 2021-2023, mencakup dinamika pra dan pasca kerja sama IJMF. Melalui kerjasama *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF), Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama keamanan maritim dan peningkatan kapasitas maritim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori Kerjasama Internasional K.J.Holsti dan perspektif Liberalisme yang menekankan pada kerjasama internasional antarnegara dalam menghadapi berbagai ancaman. Kerjasama IJMF terlaksana melalui berbagai program, seperti peningkatan kerjasama Bakamla dan *Japan Coast Guard*, koordinasi penegakan hukum, dan dukungan infrastruktur seperti SKPT di wilayah laut Natuna.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya dampak positif dari kerjasama *Indonesia-Japan Maritime Forum* terhadap keamanan maritim dengan menurunnya kasus *illegal fishing* dari 345 kasus (2014-2016) menjadi 167 kasus (2021-2023) pasca implementasi IJMF. Dampak positif kerjasama ini juga dirasakan oleh masyarakat dan nelayan lokal Natuna, dengan tidak adanya nelayan asing yang menetap serta adanya pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Selat Lampa yang meningkatkan fasilitas perikanan nelayan lokal. Namun, agresivitas kapal asing, khususnya dari Tiongkok dan Vietnam, masih menjadi tantangan bagi stabilitas kawasan di Laut Natuna Utara.

Kata kunci: *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF), Keamanan Maritim, Laut Natuna Utara, *Illegal Fishing*, Kerjasama Internasional.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) on enhancing maritime security in the Natuna Islands region. The background of this research stems from the increasing security dynamics in the North Natuna Sea caused by illegal fishing activities, territorial violations by foreign vessels, and escalating tensions in the surrounding waters. The study focuses on the period of 2021-2023, covering the dynamics before and after the implementation of the IJMF

cooperation. Through the IJMF framework, Indonesia and Japan have strengthened maritime security cooperation and capacity building.

This research employs a qualitative approach grounded in K.J. Holsti's Theory of International Cooperation and the Liberalism perspective, which emphasizes international collaboration among states in addressing common threats. The IJMF cooperation is carried out through various programs such as strengthened collaboration between Bakamla and the Japan Coast Guard, coordination in law enforcement, and infrastructure support including the development of the Marine and Fisheries Center (SKPT) in the Natuna waters.

The findings indicate that the IJMF has had a positive impact on maritime security, demonstrated by the decline in illegal fishing incidents from 345 cases (2014-2016) to 167 cases (2021-2023) following the implementation of the cooperation. Positive outcomes have also been experienced by local communities and fishermen in Natuna, as there are no longer foreign fishermen settling in the area, and the establishment of the SKPT in Selat Lampa has improved fishery facilities for local fishermen. Nevertheless, aggressive activities by foreign vessels, particularly from China and Vietnam, remain a challenge to maintaining stability in the North Natuna Sea.

Keywords: *Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF), Maritime Security, North Natuna Sea, Illegal Fishing, International Cooperation.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terpisah oleh perairan dangkal dan dalam (selat, laut territorial, dan laut lepas). Wilayah perairan ini memiliki keanekaragaman sumber daya hayati yang luar biasa, yang menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Kondisi geografis Indonesia: Sekitar 5,8 juta km² perairan laut terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut territorial, 2,8 juta km² perairan laut nusantara, dan 2,7 juta km² perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)¹ yang merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya terdiri dari perairan laut, yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, yang memiliki sumber daya laut dan ikan yang melimpah.

Indonesia memiliki posisi strategis, terutama dalam hal perdagangan dan pelayaran, karena berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia tidak mungkin menghindari dunia internasional dan globalisasi, yang secara tidak langsung melibatkannya dalam perpolitikan internasional. Ini karena posisi strategisnya. Selain itu, Indonesia menduduki dua pertiga wilayah Asia Tenggara, menjadikannya faktor penting dalam stabilitas wilayah tersebut. Akibatnya, keamanan perairan yurisdiksi Indonesia berfungsi sebagai ukuran keamanan perairan Asia Tenggara.²

Karena luas dan strategisnya perairan laut Indonesia tersebut, sumber daya perikanan yang besar menarik perhatian pihak asing untuk mengambil keuntungan dari sumber daya tersebut secara ilegal melalui

¹ Rokhmin Dahuri 2010, pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia yang Maju, Adil Makmur, dan Berdaulat, PKSPL-IPB, Bogor, hal.15

² Marsetio, Kepentingan Nasional dalam Perspektif Maritime Domain Awareness (Kewaspadaan Lingkungan Maritim), Jalasena, Edisi April 2012

penangkapan ikan.³ Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak sumber daya kelautan yang potensial yang belum dieksplorasi dan dimanfaatkan sepenuhnya. Potensi total sumber daya ikan di perairan Indonesia diperkirakan mencapai 9,931 juta ton per tahun, dengan potensi tertinggi terletak di WPP 718 (Laut Arafura) sebesar 1,992 juta ton per tahun (20%), diikuti oleh WPP 572 (Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda) sebesar 1,228 juta ton per tahun (12%), dan WPP 711 (Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan) sebesar 1,143 juta ton per tahun (12%).⁴

Salah satu masalah mengenai maritim yang menarik perhatian adalah adanya ancaman maritim di wilayah Laut Natuna Utara. Peningkatan kasus pembajakan, perampokan kapal setiap tahun, disertai dengan maraknya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia dan adanya ketegangan di wilayah Laut Natuna Utara, telah menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara. Dari berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan maritim, praktik *illegal fishing* merupakan yang paling dominan. Kapal-kapal ikan yang berasal dari negara seperti Tiongkok, Thailand, dan Vietnam kerap ditemukan melakukan

kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.⁵

Indonesia berusaha untuk mengatasi masalah maritim dengan bekerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang maritim. Kunjungan delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Luhut ke Jepang pada 20-21 Desember 2016 lalu menghasilkan pembentukan forum bilateral. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Jepang telah menandatangani Memorandum Kerja Sama Pembentukan *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF), yang dibentuk secara resmi. *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF) adalah inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang untuk memperkuat serta menjaga keamanan maritim yang berlandaskan pada hukum internasional. Didirikan pada tahun 2016, IJMF menjadi forum resmi pertama yang dibentuk melalui *Momarendum Cooperation To Establish*. Forum ini bertujuan untuk membahas kolaborasi strategis di bidang maritim antara kedua negara, mencakup aspek keamanan dan keselamatan maritim, pengembangan ekonomi maritim termasuk infrastruktur dan konektivitas, serta pelatihan dan kejuruan di sektor maritim.⁶

Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) menjadi forum penting bagi Indonesia dan Jepang untuk bekerja sama dalam berbagai bidang maritim,

³ Simela Victor Muhammad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", Mei 2012, hlm 60

⁴ Ali Suman, Hari Eko Irianto, Fayakun Satria, dan Khairul Amri, "Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 8, no. 2 (2016): 97.

⁵ Kepala Pusat P2K-OI. "Diplomasi Pertahanan Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri". (2016). Hal. 12

⁶ Memorandum of Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan on Establishment of Indonesia Japan Maritime Forum to Strengthen and Accelerate Maritime Cooperation. <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filenam> diakses pada tanggal 17 Desember 2024.

serta membantu menciptakan dan menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, perdamaian, dan keamanan. Bidang keamanan dan keselamatan laut, pembangunan ekonomi maritim, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan dan pelatihan maritim adalah contoh kerja sama antara kedua negara ini. Menko Maritim juga membahas kerja sama strategis dengan Jepang di wilayah Sabang, Natuna, Morotai, dan Maluku selama kunjungan kerja ini. Agenda utama kunjungan kerja adalah (1) pembentukan Forum Maritim Indonesia-Jepang; (2) diskusi tentang kerja sama infrastruktur, seperti Pelabuhan Patimban dan Kereta Api Cepat Jakarta-Surabaya; dan (3) diskusi tentang kerja sama keamanan laut.⁷

Kedua pemerintah setuju untuk terus saling mengkoordinasikan keamanan dan keselamatan maritim, berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui pengembangan dan pembangunan pelabuhan patimban di pulau-pulau terluar Indonesia, dan berbicara tentang situasi di kawasan Laut Natuna Utara.⁸

KERANGKA TEORI Perspektif Liberalisme

⁷ Info Publik Portal Berita Info Publik. Indonesia-Jepang Bentuk Forum Kerjasama Maritime diakses dari <https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/415998/index.html> pada 14 Oktober 2024.

⁸ MOFA. "Japan-Indonesia Foreign Ministers' Meeting (Japan-Indonesia Ministerial-Level Strategic Dialogue)". Ministry Of Foreign Affairs Of Japan, 2020. https://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page3e_001151.html diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

Teori liberalisme institusional yang diajukan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye memiliki tujuan untuk mendorong kolaborasi di antara negara-negara serta memperkuat stabilitas keamanan melalui pengelolaan lembaga internasional.⁹ Tujuan utama dari teori ini adalah menciptakan lingkungan global yang lebih stabil, harmonis, dan tanpa konflik. Dalam pandangan liberalisme institusional, kerjasama antara negara-negara dianggap sebagai metode yang efektif demi mencapai tujuan yang sama, menyelesaikan perbedaan, dan menghindari konflik. Lembaga internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) dipandang sebagai alat yang sangat penting untuk memfasilitasi kerjasama dan mengatur hubungan antar-negara dengan cara yang lebih terstruktur.

Liberalisme tidak terpisahkan dari kerjasama internasional karena pada dasar prinsipnya, liberalisme menekankan pada perdamaian dan kolaborasi. Salah satu bentuk dari liberalisme ialah kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah sisi yang berbeda dari konflik internasional. Isu utama dari kerjasama internasional adalah dengan berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang didapatkan dari kerjasama antar kedua belah pihak. Kerjasama *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF) merupakan komitmen antara Indonesia dan Jepang dalam mencapai kedamaian dengan berkompromi mengenai tujuan kedua negara ini. Adanya kesamaan kepentingan antara kedua negara ini

⁹ Keohane, Robert & Nye, Joseph. (1977). *Power and Interdependence: World Politic in Transition*. Boston: Little Brown

menjadi landasan utama dalam kerjasama tersebut. Sebagai negara maritim, kedua negara ini memiliki pandangan yang sama mengenai adanya ancaman maritim seperti pelanggaran kedaulatan, praktik illegal fishing, serta pembajakan dan perampokan kapal yang bisa mengganggu stabilitas keamanan wilayah maritim.

Teori Kerjasama Internasional

Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional adalah proses di mana negara- negara yang saling berhubungan bekerja sama untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Berbicara dan bernegosiasi tentang masalah-masalah tersebut, menemukan fakta-fakta teknis (faktor-faktor) yang mendukung solusi tertentu, dan mencapai perjanjian yang didasarkan pada pemahaman yang sama antara kedua belah pihak.¹⁰

Menurut K.J Holsti, proses kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Kerja sama internasional terjadi ketika dua atau lebih negara memiliki kepentingan, nilai, atau tujuan yang sejalan, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang dirasakan bersama oleh semua pihak.
- b. Kerja sama muncul karena adanya pandangan atau keyakinan bahwa kebijakan suatu negara akan mendukung negara lain dalam mencapai nilai serta kepentingan nasionalnya.
- c. Negara-negara yang terlibat membuat persetujuan untuk memanfaatkan kesamaan kepentingan atau menyelesaikan

benturan kepentingan di antara mereka.

- d. Kesepakatan kerja sama dapat diwujudkan melalui aturan formal maupun informal yang mengatur transaksi atau hubungan di masa depan sebagai upaya pelaksanaan persetujuan yang telah dicapai.
- e. Tahap akhir kerja sama ditunjukkan melalui kegiatan nyata seperti transaksi, pertukaran informasi, atau program bersama untuk merealisasikan komitmen yang telah disepakati.

Dalam konteks *Indonesia-Japan Maritime Forum*, kerjasama ini bisa jadi upaya kedua negara untuk meningkatkan keamanan maritim di Kepulauan Natuna, terutama karena Indonesia dan Jepang punya kepentingan menjaga keamanan laut untuk stabilitas ekonomi dan energi. Kerja sama ini bisa berdampak pada peningkatan patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, dan pengembangan kapasitas keamanan laut Indonesia, sehingga meningkatkan keamanan maritim di Natuna.

Level Analisis

Penelitian ini membutuhkan tingkat analisis untuk membantu peneliti mengidentifikasi variabel yang memengaruhi tindakan pelaku. Menurut Mochtar Mas'ood, terdapat lima tingkatan analisis dalam konteks hubungan internasional, meliputi individu, kelompok individu, negara atau bangsa, kelompok negara, dan sistem internasional.¹¹

¹⁰ K.J Holsti. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. (Jakarta, 1998). Hal 65.

¹¹ Mochtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta: LP3ES, 1994), hal.35

Analisis yang berfokus pada tingkat keempat berpendapat bahwa negara-bangsa seringkali tidak bertindak secara individual, melainkan sebagai bagian dari kelompok. Mereka melihat hubungan internasional sebagai interaksi yang menciptakan pola dan pengelompokan. Oleh karena itu, unit analisis yang perlu diteliti adalah pengelompokan negara, seperti kelompok regional, aliansi, persekutuan ekonomi dan perdagangan, blok ideologi, serta pengelompokan dalam PBB, dan lain-lain.¹²

Dengan menggunakan pendekatan tingkat kelompok negara, penelitian akan lebih fokus pada forum kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Analisis pada level ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana dampak dari kerjasama *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF) terhadap Kepulauan Natuna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penyelidikan terhadap fenomena alamiah dengan peneliti sebagai alat utama dalam prosesnya.¹³ Menurut Moleong penelitian kualitatif bertujuan untuk meraih pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan elemen lainnya. Pendekatan ini dilakukan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan fokus pada konteks khusus yang

alamiah.

Studi kualitatif ini mengadopsi jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah upaya untuk menjelaskan secara sistematis fakta-fakta yang terkumpul selama proses penelitian. Penelitian tipe deskriptif bertujuan untuk memaparkan penjelasan, deskripsi, dan validasi dari sebuah permasalahan yang diteliti. Penelitian tipe deskriptif ini memberikan gambaran mengenai dampak kerjasama *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF) terhadap Kepulauan Natuna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Indonesia dan Jepang dalam Pembangunan di Bidang Kemaritiman

Indonesia dan Jepang telah menjalin kerjasama yang erat sejak lama, dimulai dengan hubungan diplomatik yang resmi pada Januari 1958 melalui penandatanganan perjanjian damai di Jakarta, yang dianggap dapat memberikan manfaat bagi kedua negara di masa depan. Kerjasama ini mencakup hampir semua sektor, termasuk ekonomi, budaya, sosial, dan keamanan, serta melibatkan interaksi antara pemerintah kedua negara. Dengan demikian, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang terus berlanjut hingga saat ini.¹⁴

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, perhatian utama dalam pemerintahan dan politik luar negeri Indonesia adalah mendapatkan

¹² Mochtar Mas'oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta: LP3ES, 1994), hal.47

¹³ Dr. Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁴ Safitri, R. M. 2018. "Indonesia-Japan Bilateral Relations: The Implementation of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement on the Deployment and Acceptance of Indonesian Migrant Workers (Nurses) to Japan in 2008-2015." President University. Hal. 1.

pengakuan atas kemerdekaan Indonesia dari negara-negara lain serta mempertahankan kemerdekaan tersebut dengan mengumumkan poros anti-imperialis yang meliputi “Jakarta-PhnomPenh-Hanoi-Pyongyang-Peking.” Meskipun isu maritim tetap menjadi perhatian pemerintah, tingkat kepedulian terhadap isu tersebut tidak menjadi prioritas utama. Pada awal masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan melalui adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.¹⁵

Ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, BJ. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Gus Dur memfokuskan kebijakan pemerintahannya dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk mencari bantuan dari negara-negara donor demi memulihkan ekonomi Indonesia, termasuk melakukan perjalanan ke Jepang. Namun, kebijakan yang diambil oleh Gus Dur menuai polemik, yang akhirnya menyebabkan dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Selama dua tahun masa kepresidenannya Gus Dur setidaknya memiliki gagasan dan arah kebijakan di bidang kemaritiman dengan membentuk departemen eksplorasi laut, karena ia percaya bahwa laut adalah masa depan Indonesia.¹⁶ Selama kurang lebih tiga

tahun masa pemerintahannya, Megawati berhasil memulihkan stabilitas pada tingkat yang cukup baik, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional. Namun, sektor maritim kurang mendapatkan perhatian, meskipun pada saat itu Presiden Megawati telah meluncurkan “Seruan Sunda Kelapa”. Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, kebijakan Indonesia cenderung mengedepankan diplomasi total yang mencerminkan peran aktor-aktor dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era demokrasi.¹⁷

Presiden Megawati menjabat selama tiga tahun sebelum digantikan oleh Presiden Yudhoyono pada tahun 2004. Selama masa pemerintahannya, di bidang kemaritiman, Presiden Yudhoyono mengubah Dewan Kelautan Indonesia menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.¹⁸ Isu maritim pada masa kepemimpinan Yudhoyono menjadi topik yang dibahas, tetapi tidak dianggap sebagai prioritas dalam pembangunan atau kebijakan Indonesia.¹⁹

Keseriusan Jokowi dalam menjadikan maritim sebagai salah satu fokus kebijakan selama masa pemerintahannya disampaikan melalui pidato perdananya yang resmi mengenai penjelasan awal pilar-pilar PMD pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9

¹⁵ P4W LPPM IPB. “Prosiding Seminar Nasional (ASPI) 2018”. (Bogor. Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Institut Pertanian Bogor, 2019). Hal.322.

¹⁶ Toto Pribadi, dkk. “Sistem Politik Indonesia”. (2017). Hal. 9.33.

¹⁷ Khanisa dan Farhana, Faudzan. “Keamanan Maritim ASEAN dalam prespektif ekonomi politik Indonesia”. Hal.4.

¹⁸ 2 P4W LPPM IPB. “Prosiding Seminar Nasional (ASPI) 2018”. Hal.324.

¹⁹ Nazaruddin Nasution. “Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia”. (2018). Hal. 111-121.

Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar.²⁰

Semakin menunjukkan keseriusannya dalam bidang maritim, pemerintah Indonesia dan Jepang telah sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk maritim, investasi, lingkungan, dan energi. Dalam upaya untuk mengukuhkan perdamaian dan keamanan di perairan yang mengelilingi Indonesia, Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Jepang akan memberikan dukungan lebih lanjut dalam meningkatkan kemampuan maritim, termasuk penelitian yang sedang dilakukan untuk kerjasama hibah kapal patrol.²¹

Pada tanggal 13 Desember 2017, dialog strategis pertama antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka Indonesia-Japan Maritime Forum diadakan di Tokyo. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan, sementara pemerintah Jepang diwakili oleh Mr. Kazuyuki Nakane. Dalam pertemuan forum tersebut, kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama di bidang keamanan maritim yang mencakup berbagai aspek, seperti keamanan dan keselamatan maritim, pembangunan infrastruktur dan

konektivitas maritim, serta pelatihan dan kejuruan di sektor maritim.²²

Pada tanggal 25 Juni 2018, Menteri Luar Negeri Jepang, Kono Taro, melakukan kunjungan ke Indonesia untuk bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Dalam kesempatan tersebut, kedua negara mengadakan *The 2nd Joint Committee Japan-Indonesia Maritime Forum* sebagai tindak lanjut dari *The 1st Joint Committee Japan-Indonesia Maritime Forum*.²³ Pertemuan ini bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang, yang didasarkan pada saling percaya dan pengertian antara kedua negara. Berdasarkan hal ini, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang keamanan maritim melalui *Indonesia-Japan Maritime Forum*, yang sebagian besar dibentuk untuk memfasilitasi kolaborasi antara angkatan laut Indonesia dan Jepang.²⁴

²² Siaran Pers Bersama Oleh Kementerian Luar Negeri Jepang dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000323211.pdf> diakses pada 24 Februari 2025.

²³ Embassy Japan. Pertemuan Menteri Luar Negeri Jepang Kono Taro dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Y. M. Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Embassy Japan, 2018 https://www.id.emb-japan.go.jp/news18_14.html diakses pada tanggal 24 Februari 2025.

²⁴ Indah Gilang Pusparani. "RI-Jepang memperkuat kerjasama maritim dan infrastruktur". GoodNews, 2018. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/06/26/ri-jepang-perkuatkerjasama-maritim-dan-infrastruktur> diakses pada tanggal 25 Februari 2025.

²⁰ Khanisa & Faudzan Farhana. "Keamanan Maritim ASEAN dalam perspektif ekonomi politik Indonesia". (2018): 2.

²¹ Desca Lidya. "Indonesia dan Jepang sepakat perkuat kerjasama maritim hingga energi". Antara. <https://m.antaranews.com/amp/berita/3021097/indonesia-dan-jepang-sepakat-perkuat-kerja-sama-maritim-hingga-energi> diakses pada 22 Februari 2025.

Dalam pertemuan antara Indonesia dan Jepang melalui *The 2nd Joint Committee Japan-Indonesia Maritime Forum*, kedua pemerintah menyadari betapa pentingnya memperkuat kerjasama di bidang keamanan maritim, terutama dengan adanya isu konflik di Laut Natuna Utara yang dapat memicu ketidakstabilan di kawasan, mengingat tindakan agresif yang ditunjukkan oleh China. Kedua pemerintah menegaskan bahwa Indonesia dan Jepang bukan hanya sekadar mitra strategis, tetapi juga memiliki peran yang sangat signifikan di kawasan tersebut.²⁵

Pada 10 Januari 2020, Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, mengadakan pertemuan ketiga *Joint Committee Indonesia-Japan Maritime Forum* dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan. Jepang menyatakan keinginannya untuk berkolaborasi secara aktif dalam pemerintahan Jokowi Jilid II sebagai tindak lanjut dari pertemuan puncak antara kedua pemimpin negara sebelumnya. Dua pertemuan *Joint Committee Indonesia-Japan Maritime Forum* yang telah berlangsung sebelumnya telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat hubungan antara kedua negara dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kerjasama bilateral Indonesia-Jepang, yang mengarah pada kolaborasi yang lebih

erat dalam isu-isu regional dan global, terutama di bidang kemaritiman.²⁶

Konflik yang Terjadi di Laut Natuna Utara dan Urgensi Penangannya oleh Jepang dan Indonesia

Ancaman terhadap perairan Indonesia semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas ilegal di wilayah laut, seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi keamanan dan kedaulatan maritim nasional. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah Laut Natuna Utara, yang secara strategis terletak di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.²⁷

Pada tahun 2017, kapal pengawas Hiu Macan 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap kapal asing yang telah memasuki wilayah perairan Indonesia sebanyak 19 kali antara bulan Oktober dan November 2017. Kapal yang tertangkap adalah kapal Fu Yuan Yu 831, KIA yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Pada pertengahan tahun 2019, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

²⁵ Azis Kurmala. "Indonesia-Jepang tingkatkan kerja sama maritim". AntaraNews, 2018. <https://www.antaranews.com/berita/715903/indonesia-jepang-tingkatkan-kerja-sama-maritim> internet diakses pada 25 Februari 2025.

²⁶ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. "Pertemuan Menteri Luar Negeri Jepang, Bapak Motegi Toshimitsu dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Y.M. Luhut Binsar Panjaitan (Pertemuan ke-3 Joint Committee Indonesia-Japan Maritime Forum". Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2020. https://www.id.emb-japan.go.jp/news20_04.html diakses pada 25 Februari 2025.

²⁷ Martin D.Mitchell. "The South China Sea: A Geopolitical Analysis". *Journal of Geography and Geology*. Vol. 8, No. 3. (2016). Hal. 1-13.

kembali berhasil mengamankan sebuah kapal yang diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, yang kemudian diketahui merupakan kapal ikan asing (KIA) berbendera Tiongkok. Dilanjutkan pada tahun 2020, Kapal Pengawas Perikanan KKP menangkap 27 Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara. Sementara itu, pada tahun 2021, aktivitas intrusi kapal-kapal Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia semakin meningkat. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai jenis kapal, termasuk kapal penangkap ikan, kapal penelitian, kapal penjaga pantai, hingga kapal militer milik Tiongkok.²⁸

Intrusi kapal ikan asing di perairan Indonesia, khususnya di kawasan Laut Natuna Utara, terus menjadi permasalahan yang serius dan berlangsung secara berkelanjutan. Kapal-kapal tersebut, terutama yang berasal dari Tiongkok dan Vietnam, kerap melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang merugikan negara.

Sebagai dua negara maritim, Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan pandangan mengenai berbagai bentuk pelanggaran kedaulatan, seperti pembajakan, perampokan bersenjata di laut, *illegal fishing*, hingga sengketa wilayah, yang dianggap sebagai kejahatan maritim serius dan berpotensi mengancam keamanan

serta keselamatan di laut. Kedua negara menaruh perhatian besar terhadap ancaman tersebut dan berkomitmen untuk bekerja sama dalam penanganan dan pencegahannya.²⁹

Ancaman terhadap keamanan maritim yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di wilayah perairan Indonesia tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia hingga mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi Jepang. Hal ini disebabkan oleh posisi strategis perairan Indonesia yang menjadi jalur utama (*energy life line*) bagi distribusi energi menuju Jepang.

Jepang mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan energi dan 60 persen pasokan pangan domestiknya yang melewati perairan Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia menjadi hal yang sangat krusial, tidak hanya bagi Jepang dalam menjaga stabilitas rantai pasoknya, tetapi juga bagi Indonesia dalam melindungi dan mengelola kekayaan sumber daya lautnya melalui penguatan sistem keamanan maritim nasional.³⁰ Laut Natuna Utara dapat berdampak besar terhadap perekonomian Jepang, terutama karena ketergantungan negara tersebut terhadap impor energi dan bahan baku

²⁸ Dinda Ayuningtyas, "Ancaman Kedaulatan di Laut Natuna Utara: *Illegal Fishing* pada Tahun 2017–2021," *kumparan.com*. 14 Maret 2024. <https://kumparan.com/dinda-ayuningtyas/ancaman-kedaulatan-di-laut-natuna-utara-illegal-fishing-pada-tahun-2017-2021-22LFjwWLNpG/full>. Diakses pada 18 Oktober 2025.

²⁹ Swastika, Mayora Bunga. "Latar Belakang Peran Aktif Jepang di Anti-Piracy Asia Tenggara dalam Perspektif Konstruktivisme". *Jurnal Hubungan Internasional* 6, No. 2. (2018): 1-14.

³⁰ Hasan Kamran Dastjerdi dan Narjessadat Hosseini Nasrabady. "Role of Malacca Strait with a Geopolitical and Strategic Approach". *Geopolitics Quarterly*. Vol. 16, No.4. (2021). Hal. 264-287

dari kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Urgensi kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam penguatan keamanan maritim muncul sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman terhadap stabilitas kawasan, terutama di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara. Maka dari itu Indonesia dan Jepang melaksanakan berbagai bentuk kerjasama untuk penguatan perairan Indonesia terkhusus di Laut Natuna Utara.

Indonesia dan Jepang telah mencapai kesepakatan untuk memperkuat kerja sama dalam pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di berbagai pulau terluar Indonesia, termasuk di Natuna. Pada tahun 2019, *Japan International Cooperation Agency* (JICA) memberikan hibah sebesar 2,5 miliar yen atau sekitar Rp324 miliar guna mendukung pengembangan enam SKPT di wilayah tersebut, dengan Natuna menjadi salah satu lokasi penerima manfaat.³¹

Pemerintah Indonesia dan Jepang melalui *Indonesia-Japan Maritime Forum* telah menyepakati langkah bersama untuk meningkatkan keamanan maritim Indonesia dengan mempercepat pelaksanaan kerja sama antara Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan *Japan Coast Guard* (JCG). Kerja sama ini difokuskan pada upaya menjaga keamanan serta keselamatan di wilayah perairan

Indonesia. Pihak Jepang meyakini bahwa inisiatif ini akan memberikan manfaat besar bagi kedua lembaga dan memperkuat hubungan strategis kedua negara.³²

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan *Japan Coast Guard* (JCG) bekerja sama dalam menyelenggarakan pelatihan serta pengembangan keterampilan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kemaritiman, sekaligus melakukan pengadaan kapal patroli untuk memperkuat sistem keamanan laut Indonesia. Selain itu, kedua lembaga tersebut juga melakukan pertukaran informasi terkait aktivitas *illegal fishing*, pembajakan dan perompakan, serta berbagai tindakan ilegal lainnya yang dapat mengancam stabilitas keamanan maritim Indonesia.³³

Analisis Dampak dari Kerjasama Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) terhadap Keamanan Maritim Kepulauan Natuna

Meningkatnya kejahatan lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia terutama di wilayah Laut Natuna Utara merupakan dampak dari globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi. Perkembangan ini membuat

³¹ Yashinta Difa Pramudyani. "Indonesia, Jepang perkuat kerja sama perikanan di Natuna". Antara, 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1244236/indonesia-jepang-perkuat-kerja-sama-perikanan-di-natuna> diakses pada 22 Oktober 2025

³² PosKota. "Bakamla RI Saling Tukar Informasi dengan Penjaga Laut Negeri Sakura". PosKota, 2020. <http://poskota.co.id/2020/10/9/bakamla-ri-saling-tukar-informasi-dengan-penjaga-laut-negeri-sakura?halaman=1> diakses pada 22 Oktober 2025

³³ Letnan Kolonel Laut (Purn.) John F. Bradford. "Fokus Strategis bagi Jepang". Indo-Pacific Defense Forum, 2021. <https://ipdefenseforum.com/id/2021/09/fokus-strategis-bagi-jepang/> pada 20 Oktober 2025

kegiatan lintas negara semakin mudah, namun juga membuka peluang terjadinya berbagai tindakan ilegal. Dalam kajian hubungan internasional, keamanan kemudian menjadi hal yang sangat penting bagi setiap negara. Pengalaman dari berbagai perang di masa lalu membuat negara-negara di dunia lebih waspada dan berupaya mencegah kemungkinan terjadinya konflik di masa depan.³⁴

Sumber daya perikanan yang melimpah di Laut Natuna menjadikannya pusat perhatian dan incaran negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, Tiongkok, Thailand, dan Malaysia. Negara-negara tersebut berulang kali melakukan praktik pencurian ikan secara ilegal, tanpa mengindahkan ketentuan hukum internasional maupun nasional yang menegaskan bahwa Laut Natuna merupakan wilayah kedaulatan sah milik Indonesia.³⁵

Pada 5 Desember 2014, pemerintah Indonesia menenggelamkan tiga kapal nelayan asal Vietnam yang terbukti melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Ketiga kapal tersebut sebelumnya ditangkap oleh KRI Imam Bonjol-383 pada 2 November 2014 saat sedang menjaring ikan di perairan Indonesia, sekitar 25 mil laut dari Tarempa, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, tepatnya pada titik koordinat sekitar 73,1 km di

sebelah timur Tarempa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melaporkan bahwa pada 19 November 2014, pengawas perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap lima kapal yang beroperasi secara ilegal di perairan Laut Natuna. Kapal-kapal tersebut adalah KM Laut Natuna 99 (101 GT), KM Laut Natuna 30 (102 GT), KM Laut Natuna 25 (103 GT), KM Laut Natuna 24 (103 GT), dan KM Laut Natuna 23 (101 GT).³⁶

Pada tahun 2015, aktivitas ilegal fishing di Perairan Natuna menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari jumlah kapal yang tertangkap maupun dari asal negara pelaku penangkapan ikan ilegal. Hingga bulan September 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui kapal pengawasnya berhasil menangkap 57 kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah tersebut. Dari jumlah tersebut, 38 kapal berbendera Vietnam, 8 kapal berbendera Filipina, 6 kapal asal Malaysia, dan 5 kapal dari Thailand.³⁷

Pada tahun 2016, aktivitas kapal asing di Laut Natuna mengalami peningkatan yang cukup signifikan, salah satunya ditandai dengan insiden masuknya kapal ikan asal Tiongkok ke wilayah perairan Indonesia pada Maret 2016. Indonesia mengalami kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp 2,98 triliun, dengan sekitar 280 kapal asing terdeteksi beroperasi

³⁴ Barry Buzan. "Rethinking Security After Cold War". Hal 8.

³⁵ Maulandy Rizky. "Riset dan Penguatan SDM Jadi Modal Utama dan Pengembangan Ekonomi Kelautan". *Liputan6*, 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4755023/riset-dan-penguatan-sdm-jadi-modal-utama-pengembangan-ekonomi-kelautan>. Diakses pada 6 November 2025.

³⁶ Jay Fajar. "Pemerintah Mulai Tegas Tangkap Kapal Ilegal Fsihing." *Mangabay*, 2014. <https://mongabay.co.id/2014/11/22/pemerintah-mulai-tegas-tangkap-kapal-ilegal-fishing/>. Diakses pada 6 November 2025.

³⁷ Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015

secara ilegal di wilayah Natuna antara Mei hingga Desember 2016.³⁸

Sepanjang tahun 2021, KKP berhasil menangkap 38 kapal ikan asing, terdiri dari 10 kapal berbendera Malaysia, 5 kapal berbendera Filipina, dan 23 kapal berbendera Vietnam. Tingginya jumlah kapal Vietnam yang tertangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711, khususnya di bagian utara, menunjukkan bahwa Vietnam masih belum menghormati hak berdaulat Indonesia di wilayah tersebut.³⁹

Berdasarkan hasil deteksi *Automatic Identification System* (AIS) dan citra satelit, ditemukan 35 kapal Vietnam pada Juli, 32 kapal pada Agustus, dan 56 kapal pada September 2022 yang diduga kuat melakukan praktik illegal fishing di perairan LNU.⁴⁰

Pada tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil melaksanakan operasi penegakan hukum di laut yang berujung pada penangkapan enam kapal ikan asing yang diduga kuat melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁴¹ Adanya kerjasama *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF) ini memberikan dampak yang cukup signifikan

terhadap upaya dalam memberantas *illegal fishing* di wilayah Laut Natuna Utara. Pada periode tahun 2014-2016, yakni sebelum forum kerjasama ini terbentuk, tercatat sekitar 345 kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah Laut Natuna Utara.

Dampak positif dari kerjasama ini mulai nampak setelah pelaksanaan aktif IJMF pada tahun 2020. Selama periode 2021 hingga 2023, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah kegiatan illegal fishing di Laut Natuna Utara hingga hanya 167 insiden, yang mencerminkan keberhasilan kerjasama antara kedua negara dalam meningkatkan pengawasan maritim.

Sebelum adanya kebijakan Jokowi mengenai isu maritim di Indonesia, wilayah laut Kepulauan Natuna khususnya Desa Setumuk menghadapi tantangan aktivitas ilegal yang sering dilakukan oleh WNA dari negara berbendera Vietnam dan Thailand. Desa Setumuk merupakan bagian dari Pulau Tiga yang termasuk ke dalam pulau yang terdapat di Kepulauan Natuna. Desa Setumuk sering menjadi tempat persinggahan bahkan menjadi tempat sementara untuk tinggal bagi warga negara asing dari Vietnam maupun Thailand ini. Para WNA ini membuat pemukiman di tepian Desa Setumuk yang tidak terdapat tempat tinggal penduduk sekitar. Warga negara asing ini membuat pemukiman tempat tinggal dengan tujuan untuk menetap sementara dan melakukan aktivitas ilegal dengan mencuri ikan di sekitar laut Kepulauan Natuna.

Kepala Desa Setumuk menyebut bahwa dari tahun 2019, tidak terdapat lagi nelayan dan kapal asing yang masuk ke wilayah Desa Setumuk ini,

³⁸ Atifa Ririn, Fadhil Imam. "Strategi Indonesia dalam Menangani Kasus Ilegal Fishing di Wilayah Perairan Natuna". Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan. Vol 2, No. 1 (2025). Hal 21.

³⁹ Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), *Analisis Aktivitas Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara Mei 2021*, Jakarta: IOJI, 2021.

⁴⁰ Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), *Laporan Pemantauan Aktivitas Kapal Asing di Laut Natuna Utara Periode Juli–September 2022*, Jakarta: IOJI, 2022.

⁴¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

hal ini menunjukkan adanya kemajuan pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu maritim di Kepulauan Natuna. Dengan bantuan Jepang, Indonesia memiliki sumber daya alat dan sumber daya manusia dalam memerangi kejahatan anacaman maritim di wilayah Kepulauan Natuna ini.⁴²

Ancaman maritim di laut Natuna tidak hanya terjadi di Desa Setumuk, namun juga terjadi di Pulau Sedanau. Pulau Sedanau merupakan salah satu pulau di Kabupaten Natuna yang dikenal dengan nama “kota terapung” dikarenakan kebanyakan rumah penduduk pulau ini dibangun diatas air laut. Pulau Sedanau memiliki potensi produksi sumber daya ikan seperti ikan tongkol dan ikan teri. Sehingga nelayan asing dari Thailand dan Vietnam sering mampir di sekitar Pulau Sedanau untuk mencuri sumber daya laut tersebut. Kebijakan Jokowi mengenai pentingnya laut Indonesia membuka jalan bagi para nelayan lokal untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya laut Pulau Natuna.

Berdasarkan wawancara online kepada salah satu nelayan teri lokal Sedanau, beliau berpendapat bahwa adanya peran pemerintah dan kebijakan Jokowi mengenai pentingnya maritim Indonesia serta kerjasama antara Indonesia Jepang membuat potensi laut Pulau Sedanau berkembang dan bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan lokal. Nelayan asing dari Thailand dan Vietnam yang dulu sering mengambil sumber daya ikan di laut sekitar laut Pulau Sedanau kini

tidak ada lagi karna sudah dibasmi oleh pemerintah.⁴³

Hasil konkret kerjasama Indonesia Jepang dalam *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF) juga bisa dilihat dari adanya pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna, khususnya di Selat Lampa. SKPT yang di bangun di Selat Lampa pada tahun 2016 dan diresmikan tahun 2019 ini menjadi fasilitas pengelolaan perekonomian daerah pada sektor perikanan. Dengan alokasi dana sebesar Rp 221,7 miliar dari dana hibah Jepang, SKPT Natuna dibangun dari tahun 2016-2019. SKPT Natuna memiliki beberapa fasilitas pokok untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan kelautan dan perikanan. Kegiatan perikanan yang diutamakan di SKPT ini mulai dari pendaratan hasil laut dan perikanan serta pengolahan hingga pemasaran.⁴⁴

KESIMPULAN

Kerjasama *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF) hadir sebagai salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan keamanan maritim Indonesia, khususnya di kawasan Kepulauan Natuna. Melalui forum ini, kedua negara berkomitmen memperkuat kapasitas kelembagaan dan teknologi pengawasan laut, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta memperluas pertukaran informasi dan koordinasi keamanan maritim. Jepang, melalui lembaga seperti Japan Coast Guard (JCG) dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA), turut memberikan dukungan teknis dan

⁴² Wawancara online, 28 Oktober 2025.

⁴³ Wawancara online, 3 Desember 2025.

⁴⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

teknologi berupa pemanfaatan satelit mikro untuk mendeteksi aktivitas *illegal fishing*, serta pelatihan bagi aparat Badan Keamanan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama melalui IJMF memberikan dampak positif terhadap peningkatan keamanan maritim di wilayah Kepulauan Natuna. Terjadi penurunan signifikan dalam jumlah kasus *illegal fishing* dari 345 kasus pada periode 2014-2016 menjadi 167 kasus pada periode 2021-2023 setelah implementasi kerja sama tersebut. Dampak positif kerjasama ini juga berdampak pada masyarakat lokal dan nelayan lokal kepulauan Natuna dengan tidak adanya lagi nelayan asing dari Thailand atau Vietnam yang masuk dan bermukim di desa terpencil seperti Desa Setumuk, adanya pengembangan sektor maritim di SKPT dan banyaknya produksi teri menunjukkan bahwa keamanan maritim di Pulau Natuna sangat berkembang pesat. Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum maritim Indonesia semakin baik melalui peningkatan patroli bersama, pertukaran informasi intelijen maritim, serta optimalisasi penggunaan teknologi pemantauan. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia juga berperan penting dalam memperkuat kesiapsiagaan aparat keamanan laut dalam menghadapi berbagai ancaman lintas batas.

Forum ini tidak hanya menekan angka pelanggaran maritim, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi keamanan kawasan Indo-Pasifik. Namun demikian, meskipun hasilnya positif, tantangan masih tetap ada, terutama dalam menghadapi agresivitas kapal asing dan dinamika

geopolitik di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, keberlanjutan kerja sama IJMF serta peningkatan kapasitas nasional dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum maritim menjadi langkah penting untuk menjamin kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Suman, Hari Eko Irianto, Fayakun Satria, dan Khairul Amri. (2016). Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2).
- Atifa Ririn, Fadhil Imam. (2025). Strategi Indonesia dalam Menangani Kasus Ilegal Fishing di Wilayah Perairan Natuna. *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*. 2(1).
- Azis Kurmala. (2018). *Indonesia-Jepang tingkatkan kerja sama maritim*. AntaraNews. <https://www.antara.com/berita/715903/indonesia-jepang-tingkatkan-kerja-sama-maritim-internet>.
- Buzan, Barry. (1997). Rethinking Security After Cold War. Cooperation and Conflict: The Nordie Journal of Internasional Studies. *Oxford University Press*. 32(1), 5-7.

- Dahuri, Rokhmin. (2010). *Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia yang Maju, Adil Makmur, dan Berdaulat*. Bogor: PKSPL-IPB.
- Desca Lidya. (2022). Indonesia dan Jepang sepakat perkuat kerjasama maritim hingga energi”. Antara. <https://m.antaranews.com/amp/berita/3021097/indonesia-dan-jepang-sepakat-perkuat-kerja-sama-maritim-hingga-energi>
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015
- Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Embassy Japan. (2018). *Pertemuan Menteri Luar Negeri Jepang Kono Taro dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Y. M. Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Embassy Japan*. https://www.id.emb-japan.go.jp/news18_14.html
- Hasan Kamran Dastjerdi dan Narjessadat Hosseini Nasrabady. (2021). Role of Malacca Strait with a Geopolitical and Strategic Approach. *Geopolitics Quarterly*. 16(4), 264-287.
- Indah Gilang Pusparani. (2018). *RI-Jepang memperkuat kerjasama maritim dan infrastuktur*. GoodNews, 2018. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/06/26/>
- Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) (2022). *Laporan Pemantauan Aktivitas Kapal Asing di Laut Natuna Utara Periode Juli–September 2022*. Jakarta: IOJI.
- Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). (2021). *Analisis Aktivitas Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara Mei 2021*. Jakarta: IOJI.
- K.J. Holsti. (1988). Politik Internasional, *Kerangka Unit Analisis, jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga.
- Kepala Pusat P2K-OI. (2018). *Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia..
- Khanisa dan Farhana, Faudzan. (2018). *Keamanan Maritim ASEAN dalam perspektif ekonomi politik Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Marsetio. (2012). *Kepentingan Nasional dalam Perspektif Maritime Domain Awareness: Kewaspadaan Lingkungan Maritim*. Jalasena, edisi April.
- Martin D.Mitchell. (2016). *The South China Sea: A Geopolitical*

- Analysis. *Journal of Geography and Geology*. 8(3), 1-13.
- Mas'oed Mochtar. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3ES.
- Maulandy Rizky. (2021). *Riset dan Penguatan SDM Jadi Modal Utama dan Pengembangan Ekonomi Kelautan*. Liputan6.. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4755023/riset-dan-penguatan-sdm-jadi-modal-utama-pengembangan-ekonomi-kelautan>.
- Memorandum of Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan on Establishment of Indonesia-Japan Maritime Forum to Strengthen and Accelerate Maritime Cooperation. <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=JPN-2016-0524.pdf>.
- MOFA. (2020). *Japan-Indonesia Foreign Ministers' Meeting (Japan-Indonesia Ministerial-Level Strategic Dialogue*. Ministry Of Foreign Affairs Of Japan. https://www.mofa.go.jp/sa/sea2/id/page3e_001151.html
- Nazaruddin Nasution. (2018). *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*. Ciputat: Penguin Press.
- PosKota. (2020). *Bakamla RI Saling Tukar Informasi dengan Penjaga Laut Negeri Sakura*. <http://poskota.co.id/2020/10/9/bakamla-ri-saling-tukar-informasi-dengan-penjaga-laut-negeri-sakura?halaman=1>.
- Safitri, R. M. (2018). *Indonesia-Japan Bilateral Relations: The Implementation of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement on the Deployment and Acceptance of Indonesian Migrant Workers (Nurses) to Japan in 2008-2015*. President University
- Siaran Pers Bersama Oleh Kementerian Luar Negeri Jepang dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000323211.pdf>
- Simela Victor Muhamad.(2014). *Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. Info Singkat Hubungan Internasional*VI, 21, 5-8
- Swastika, Mayora Bunga. (2018). *Latar Belakang Peran Aktif Jepang di Anti-Piracy Asia Tenggara dalam Perspektif*
- Toto Pribadi, dkk. (2017). *Sistem Politik Indonesia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Yashinta Difa Pramudyani. (2020). *Indonesia, Jepang perkuat kerja sama perikanan di Natuna*. Antaraa.

<https://www.antaranews.com/berita/1244236/indonesia-jepang-perkuat-kerja-sama-perikanan-di-natuna>.